



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

---

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
NOMOR

TENTANG  
SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA PERIKANAN  
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 713

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Susunan Keanggotaan Unit Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);  
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan dan Lembaga Pengelola Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 631);  
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA PERIKANAN WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 713

- KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Unit Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713 yang terdiri dari:
1. Koordinator Eksekutif;
  2. Sekretariat;
  3. Pokja Data dan Informasi;
  4. Pokja Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan Konservasi;
  5. Pokja Pengendalian dan Kepatuhan;
  6. Komisi Pengelola Perikanan;
  7. Panel Konsultatif; dan
  8. Panel Ilmiah
- yang selanjutnya disebut UPP WPPNRI 713 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan UPP WPPNRI 713 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Koordinator Eksekutif  
mengoordinasikan UPP WPPNRI 713
  2. Sekretariat  
melakukan kegiatan kesekretariatan dalam mendukung pelaksanaan tugas UPP
  3. Pokja Data dan Informasi  
melakukan koordinasi kerja sama pelaksanaan RPP, serta pengumpulan, analisis, pengolahan, dan penyajian data dan informasi pelaksanaan RPP
  4. Pokja Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan Konservasi  
melakukan koordinasi analisis serta monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya ikan dan konservasi untuk merekomendasikan tindakan pengelolaan perikanan
  5. Pokja Pengendalian dan Kepatuhan  
melakukan koordinasi analisis, pemantauan, serta pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
  6. Komisi Pengelola Perikanan  
melakukan perumusan masukan dalam pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RPP, serta rekomendasi penyusunan kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPPNRI sesuai dengan kewenangannya
  7. Panel Konsultatif  
melakukan penyampaian aspirasi dan partisipasi dari pemangku kepentingan
  8. Panel Ilmiah  
memberi masukan ilmiah berdasarkan kajian ilmiah, hasil penelitian, dan/atau ilmu pengetahuan

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan [Direktur Jenderal](#) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERIKANAN TANGKAP,

RIDWAN MULYANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERIKANAN TANGKAP  
NOMOR  
TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT PENGELOLA PERIKANAN WILAYAH  
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 713

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGELOLA PERIKANAN  
WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA 713

1. Koordinator Eksekutif : Kepala Pelabuhan Perikanan Untia
2. Sekretariat : Iswadi Rachman,S.P, M.Si /  
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap  
Muda
3. Pokja Data dan Informasi

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
	Sitti Arbiana	Pelabuhan Perikanan Untia,Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Koordinator
	Faradilla Suci Prastica Sari	Pelabuhan Perikanan Untia,Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
	Muhammad Fikri	Pelabuhan Perikanan Untia,Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Anggota
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Anggota
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara	Anggota
	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Tenggara	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota

#### 4. Pokja Pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan Konservasi

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Paisal	Pelabuhan Perikanan Untia, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian	Koordinator

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
		Kelautan dan Perikanan	
2.	Sukardi	Pelabuhan Perikanan Untia, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
3.	Fardi	Pelabuhan Perikanan Untia, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Anggota
5.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
7.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
8.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Tata Ruang Kelautan Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
9.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
10.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
11.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota
12.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
13.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Tenggara	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota

#### 5. Pokja Pengendalian dan Kepatuhan

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Ignasius Ile Bungan,S.St.Pi	Pelabuhan Perikanan Untia, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Koordinator
2.	Muhammad Adam Nur	Pelabuhan Perikanan Untia, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
3.	Zulfahmi Mehdar Junior	Pelabuhan Perikanan Untia, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Abdul Hafied	Pelabuhan Perikanan Untia, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Kepala Stasiun Pengawasan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
	Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan	Kelautan dan Perikanan	
7.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Anggota
9.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
13.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
	Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi tengah		
14.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota
15.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
16.	Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota
17.	Kepala pangkalan PSDKP Bitung	Kepala pangkalan PSDKP Bitung	Anggota
18.	Katimja Inteligen dan Pengawasan SDP,	Katimja Inteligen dan Pengawasan SDP,	Anggota
19.	Kepala Satwas SDKP Makassar.	Kepala Satwas SDKP Makassar.	Anggota
20.	Kepala Stasiun PSDKP Tarakan	Kepala Stasiun PSDKP Tarakan	Anggota
21.	Katimja Inteligen dan Pengawasan SDP	Katimja Inteligen dan Pengawasan SDP	Anggota

#### 6. Komisi Pengelola Perikanan WPPNRI

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.			Koordinator

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
3.	Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
4.	Direktur Kepelabuhanan Perikanan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Direktur Usaha Penangkapan Ikan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
7.	Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
8.	Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi	Sekretariat Jenderal Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
9.	Direktur Konservasi Ekosistem	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Direktur Konservasi Spesies dan Genetik	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
12.	Direktur Pengendalian Operasi Armada	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
	Bali		
14.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	Anggota
15.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur	Anggota
17.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	Anggota
18.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Bidang Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Selatan	Anggota
19.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi tengah	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
20.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota
21.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
22.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara	Anggota

#### 7. Panel Konsultatif

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	DPD HNSI Propinsi Sulawesi Tenggara	DPD HNSI Propinsi Sulawesi Tenggara	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
2.	DPD HNSI Propinsi Sulawesi Tengah	DPD HNSI Propinsi Sulawesi Tengah	Anggota
3.	DPD HNSI Propinsi Sulawesi Selatan	DPD HNSI Propinsi Sulawesi Selatan	Anggota
4.	DPD HNSI/KNTI Propinsi Sulawesi Barat	DPD HNSI/KNTI Propinsi Sulawesi Barat	Anggota
5.	DPD HNSI Propinsi Kalimantan Selatan	DPD HNSI Propinsi Kalimantan Selatan	Anggota
6.	DPD HNSI Propinsi Kalimantan Timur	DPD HNSI Propinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
7.	DPD HNSI Nusa Tenggara Barat	DPD HNSI Propinsi Nusa Tenggara Barat	Anggota
8.	DPD HNSI Propinsi Nusa Tenggara Timur	DPD HNSI Propinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
9.	DPD HNSI Propinsi Bali	DPD HNSI Propinsi Bali	Anggota
10.	DPD HNSI Propinsi Jawa Timur	DPD HNSI Propinsi Jawa Timur	Anggota
11.	ISPIKANI	ISPIKANI Sulawesi Selatan	Anggota
12.	ISPIKANI	ISPIKANI Sulawesi Barat	Anggota
13.	Asosiasi Pole and Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI)	Asosiasi Pole and Line dan Hand Line Indonesia (AP2HI)	Anggota
14.	FIP Purse Seine Kendari	FIP Purse Seine Kendari	Anggota
15.	Yayasan Konservasi Laut	Yayasan Konservasi Laut	Anggota
16.	Yayasan IPNLF Indonesia	Yayasan IPNLF Indonesia	Anggota
17.	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Anggota
18.	Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia;	Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia;	Anggota
19.	Indonesia Tuna Consortium	Indonesia Tuna Consortium	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
20.	Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia	Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia	Anggota
21.	Sustainable Fisheries Partnership (SFP)	Sustainable Fisheries Partnership (SFP)	Anggota
22.	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)	Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)	Anggota
23.	Asosiasi Demersal Indonesia (ADI)	Asosiasi Demersal Indonesia (ADI)	Anggota
24.	Mattirotasi	Mattirotasi Sulawesi Selatan	Anggota
25.	Yayasan Romang Celebes	Yayasan Romang Celebes Sulawesi Selatan	Anggota
26.	Rekam Nusantara Foundation (RNF)	Rekam Nusantara Foundation (RNF)	Anggota
27.	WRI (World Resources Institute) Indonesia	WRI (World Resources Institute) Indonesia	Anggota
28.	Marine Stewardship Council	Marine Stewardship Council	Anggota
29.	Yayasan Bentang Alam Nusantara	Yayasan Bentang Alam Nusantara	Anggota

#### 8. Panel Ilmiah

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M. Sc	Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan	Anggota
2.	Prof. Ir. H. La Sara, M. Si, Ph. D	Universitas Halu Oleo dan Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan	Anggota
3.	Hufiadi, S. Pi, M. Si	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Anggota
4.	Prof. Dr. Ir. Najamuddin, Msc	Universitas Hasanuddin Makassar	Anggota
5.	Prof. Dr. Mukti Zainuddin, S. Pi, M. Sc.	Universitas Hasanuddin Makassar	Anggota
6.	Dr. Muhammad Kurnia, S. Pi, M., Sc.	Universitas Hasanuddin Makassar	Anggota
7.	Prof. Dr. Mukti Zainuddin, S. Pi, M. Sc.	Universitas Hasanuddin Makassar	Anggota
8.	Dr. Ismawan Tallo., M. Si.	Universitas Nusa Cendana (Undana) NTT	Anggota

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>UNIT KERJA</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
9.	Jhon Septin Mourisdo Siregar, S.Pi, M.Si	Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang	Anggota
10.	I Gede Hendrawan, S.Si., M.Si., Ph.D	Universitas Udayana	Anggoa
11.	Dr.Ir. Nyoman Dati Pertami, S.P.,	Universitas Udayana	Anggoa
12.	Dr. Dwi Budi Wiyanto, S. Kel., M.P	Universitas Udayana	Anggoa
13.	Prof. Dr.Ir. Danial Sultan, M.Si.	Universitas Muslim Indonesia	Anggota
14.	Dr. Soraya Gigentika, S.Pi, M.Si	Universitas Mataram	Anggota
15.	Prof. Dr. Sitti Hilyana	Universitas Mataram	Anggota
16.	Dr. Nurliah, S.Pi, M.Si	Universitas Mataram	Anggota
17.	Dr. Ahsan Mardjudo,S.Pi,M.Si	Universitas Alkhairaat Palu	Anggota
18.	Dr. Ir. Tenriware, S.Pi., M.Si.	Universitas Sulawesi Barat	Anggota
19.	Ir. Ady Jufri, S.Pi., M.Si.	Universitas Sulawesi Barat	Anggota
20.	Prof. Dr. Ir. Dewa Gede Raka Wiadnya, M.Sc	Universitas Brawijaya	Anggota
21.	Ledhyane Ika Harlyan, S.Pi., M.Sc.,Ph.D	Universitas Brawijaya	Anggota
22.	Dr. Muchlis Effendi, S. Pi, M. Si	Universitas Mulawarman	Anggota -

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2025  
PLT. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN  
TANGKAP

RIDWAN MULYANA